

PERENCANAAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN PEKALONGAN

Tri Yuniningsih¹, Ida Hayu DM², Nina Widowati³, dan Alif Fajar Sidiq⁴

Abstrak

Sebagai penyumbang devisa negara yang cukup besar dan potensi pariwisata yang terus berkembang serta tidak akan habis maka topik ini menarik dan penting untuk diteliti. Mengingat dalam pengembangan pariwisata perlu perencanaan yang baik dengan didukung kerjasama antar *stakeholder*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan yang dilakukan oleh Dinas dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pekalongan. Teori yang digunakan adalah teori manajemen pariwisata. Pendekatan penelitian adalah quasi kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan yang dipilih secara *snowball* dan *Key Informan* yaitu Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis domain dan taksonomi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa manajemen pariwisata dilihat dari perencanaannya masih belum baik. Saran yang disampaikan Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengatasi keterbatasan anggaran pariwisata, fasilitas, dan atraksi wisata, koordinasi dan komunikasi dengan DPMPTSP untuk bekerjasama mencari dan menarik investor, Merekrut pegawai pengelola objek wisata diluar ASN dengan seleksi ketat dan terukur.

Kata Kunci: *Manajemen, Perencanaan, Pengembangan, Pariwisata*

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata di dalam suatu negara dapat menyumbang pendapatan negara (devisa) yang cukup besar, serta secara signifikan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, serta pemerataan pembangunan spasial dan pada akhirnya akan mendorong perkembangan ekonomi. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Pendit (1990) yang tertera di dalam jurnal Strategi Pariwisata Indonesia (2012:153). Perlu diketahui juga bahwa pariwisata tidak akan habis sampai kapanpun, berbeda dengan sektor lain seperti pertambangan yang akan habis dalam kurun waktu tertentu, itulah yang membuat negara-negara

¹Departemen Administrasi Publik, FISIP-UNDIP (triyuniningsih@yahoo.com)

²Departemen Administrasi Publik, FISIP-UNDIP

³Departemen Administrasi Publik, FISIP-UNDIP

⁴Mahasiswa Departemen Administrasi Publik

Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

di dunia mulai serius melirik industri pariwisata dan Indonesia menjadi salah satu negara yang sadar akan peluang yang ada dalam industri pariwisata.

Tabel 1.
Potensi Wisata Kabupaten Pekalongan

| Potensi Wisata | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Wisata Alam | Ekowisata | Wisata Buatan | Wisata Budaya | Wisata Belanja | Wisata Religi |
| -Pantai Depok Wisata -Linggoasri -Kabalong -Pantai Wonokerto -Wisata air Kali Pencongan | Ekowisata a Petungkr iyono | -Kolam renang Langkap Indah -Kolam Renang Banyu Biru -Kolam Renang Kulu Asri -Kolam Renang Tirta Alam -Kolam renang Prima Graham Wisata | -Seni Kuntulan -Sintren -Seni Rebana -Kuda Kepang -Seni ketoprak | -Kampung Batik di Desa Kemplong -Pasar Grosir Pantura dan Pasar Grosir Bondansari -Sentra alat tenun bukan mesin (ATBM) Pakumbulan -Sentra kerajinan tempurung kelapa -Sentra bordir Kedungwuni | -Makam Siti Ambaryah Makam Ki Ageng Rogoselo -Makam Atas Angin -Makam Mbah Gendhon -Makam Mbah Faqih -Makam Syekh Siti Jenar -Makam Habib Abdurrahman -Makam Syekh Abu Bakar Bin Toha Bin Yahya -Masjid Wonoyoso -Benda Cagar Budaya Lingga Yoni -Makam Wali Tanduran |

Sumber: RPJMD Kab. Pekalongan

Tabel 1 di atas menjelaskan kepada kita bahwa ada berbagai macam potensi pariwisata di Kabupaten Pekalongan yang sangat potensial untuk ditingkatkan. Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Pekalongan sangat lengkap ada Wisata Alam, Ekowisata, Wisata Buatan, Wisata Budaya, Wisata Belanja, dan Wisata Religi. Adanya potensi pariwisata yang besar ini harus dibarengi dengan manajemen pariwisata yang baik sehingga potensi tersebut bisa tergali secara maksimal dan dapat memberikan dampak yang maksimal pula. Manajemen yang

baik tidak terlepas dari perencanaan yang baik pula. *Permasalahan* penelitian ini adalah Perencanaan yang selama ini dilakukan oleh dinas yang menangani masih belum optimal. Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah *Collaborative Effort on Mangrove Restoration in Sedari Village, Karawang District, West Java Province, ScienceDirect*. Amal Fatullah Randy, Malikusworo Hutomo, Helmi Purnama (2015), *Knowledge Sharing and Stakeholder Collaboration Practice in Solo City Planning and Development: Notes on Urban Community Nurturing Processes, ScienceDirect*. Ramalis Sobandi, Noviantari SUdarmadji (2015) Hal.161 - 170, *Social and Behavioral Science, Collaborative modeling or participatory modeling? A framework for water resources management, ScienceDirect*. Laura Basco, Andrew Warren, Eelco van Beek, Andreja Jonoski, Alessio Giardino (2017) hal. 95, *Environmental Modelling & Software*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah selain lokus penelitian juga fokus penelitian mengkaji salah satu fungsi manajemen yaitu perencanaan dikaitkan dengan konsep *colaborative governance* yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Teori yang digunakan dalam mengatasi permasalahan adalah menggunakan teori manajemen dari beberapa pakar khususnya tentang Perencanaan, pariwisata dan *colaborative governance*. *Tujuan* penelitian ini adalah untuk menganalisis perencanaan yang dilakukan oleh Dinas dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pekalongan dalam kaitannya dengan *colaborative governance*. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau referensi oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam membuat kebijakan tentang perencanaan pengembangan pariwisata.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perencanaan.

Menurut G. R. Terry (Handoko, 2011:23) ada 4 (empat) fungsi penting dari manajemen yaitu, *Planning* (Perencanaan); *Organizing* (Pengorganisasian); *Actuating* (Pengarahan); *Controlling* (Pengendalian). Menurut Luther Gullick (Handoko, 29 : 22) fungsi-fungsi manajemen terdiri dari, *Planning* (Perencanaan); *Organizing* (Pengorganisasian); *Staffing* (Penyusunan Personalia); *Directing* (Pengarahan); *Coordinating* (Pengkoordinasian) dan *Reporting* (Pelaporan). Menurut Henry Fayol (Safroni, 2012 : 47) fungsi-fungsi manajemen adalah

Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

sebagai berikut, *Planning* (Perencanaan); *Organizing* (Pengorganisasian); *Commanding* (Pengarahan); *Coordinating* (Pengkoordinasian); *Controlling* (Pengendalian). Sedangkan menurut Ernest Dale dalam Handoko (2011 : 22) fungsi-fungsi manajemen meliputi, *Planning* (Perencanaan); *Organizing* (Pengorganisasian); *Staffing* (Penyusunan Personalia); *Directing* (Pengarahan); *Innovating* (Inovasi); *Controlling* (Pengawasan). Menurut Harold Koontz & Cyril O'Donnell dalam Hasibuan (2006 : 38) ada 5 (lima) fungsi manajemen, sebagai berikut, *Planning*; *Organizing*; *Staffing*; *Directing* dan *Controlling*. W.H. Newman dalam Hasibuan (2006 : 38) kemudian juga menyebutkan bahwa ada 5 (lima) fungsi dari manajemen, yaitu, *Planning*; *Organizing*; *Assembling Resources*; *Directing*; *Controlling*. Sedangkan, Dr. Sondang P. Siagian menambahkan *motivating* dan *evaluating* pada fungsi-fungsi manajemen yang ia sebutkan (Hasibuan, 2006 : 38), antara lain, *Planning*; *Organizing*; *Motivating*; *Controlling*; *Evaluating*. Dari beberapa pendapat ahli di atas mengenai fungsi-fungsi manajemen dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa fungsi yang memiliki makna sama, yaitu tercermin pada fungsi-fungsi *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*. Sedangkan fungsi-fungsi yang lain merupakan cara penyebutan yang berbeda. Diantara berbagai pendapat para ahli tersebut terdapat perbedaan istilah atau penyebutan disetiap tahap manajemen, namun secara garis besar maknanya adalah sama. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa ada 4 (empat) fungsi atau tahapan manajemen yang mewakili pendapat-pendapat yang ada, yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*, kesimpulan ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh G.R. Terry. Kesimpulan ini diperkuat oleh pendapat Janianton Damanik dan Frans Teguh (2013:25) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen pariwisata Sebuah Pengantar Ringkas*, tahapan manajemen yang dapat di terapkan dalam manajemen pariwisata dapat dilakukan dengan berpatok kepada 4 (unsur), yaitu:

Perencanaan(Planning),Pengorganisasian (Organizing), Implementasi program dan Pengawasan (Controlling).G.R. Terry dalam Hasibuan (2006:92) mengatakan bahwa perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk

mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian Harold Koontz & Cyril O'Donnel juga memberikan pendapatnya mengenai perencanaan, perencanaan adalah fungsi serang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, program-program dan alternatif yang ada (Hasibuan, 2006:92). Ridhotullah dan Jauhar (2015:1) mendefinisikan perencanaan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Kegiatan dalam Fungsi perencanaan yaitu: Menetapkan tujuan dan target bisnis, Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, dan Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Hasibuan dalam Bukunya yang berjudul Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah) terbitan tahun 2006 halaman 92, mengatakan bahwa rencana adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu. Jenis-jenis rencana menurut Hasibuan (2006 : 95) adalah sebagai berikut, Tujuan (Objective); Kebijakan (Policy); Prosedur; Rule; Program; Budget; Metode; Strategi. Hariani (2013 : 17) mengatakan bahwa para manajer pertama-tama harus memutuskan apa yang harus dikerjakan, ia harus menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk organisasi, serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Hariani, fungsi perencanaan mencakup: Penetapan tujuan dan standar, Penetapan aturan dan prosedur, Pembuatan rencana dan Peramalan apa yang terjadi. Menurut Ghazali (Ridhatullah dan Jauhar, 2015 : 128) penyusunan perencanaan itu terbagi menjadi empat, yaitu: Merumuskan misi dan tujuan, Memahami keadaan saat ini, Mempertimbangkan faktor penghambat dan pendukung tercapainya tujuan, dan Menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan.

2. Pariwisata

Menurut Marpaung, (2016 : 11) Pariwisata atau Turisme adalah industri jasa yang menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan,

minuman dan jasa bersangkutan lainnya, seperti bank, asuransi, keamanan, dan lain-lain serta menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangan dan pengalaman baru, jadi bukan hanya menawarkan daya tarik wisata tetapi juga jasa yang ada dan mendukung industri pariwisata. Pendapat lain mengenai pariwisata dikemukakan oleh A. J. Burkart dan S. Medik (Marpaung, 2016: 12) pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja serta meliputi kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat-tempat tujuan itu. Happy Marpaung dalam bukunya sedikit mengkritik pendapat ini yaitu kurang adanya keterangan waktu, dimana menurut IUTO, waktu yang ditetapkan untuk kegiatan yang bisa disebut pariwisata setidaknya 24 jam dan tujuannya adalah untuk mengisi waktu senggang, bisnis, keluarga, perutusan, dan pertemuan. Menurut Hunziger dan Krapf (Marpaung, 2016: 13), pariwisata adalah keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing (baik wisman maupun wisnus) di suatu tempat dengan syarat orang tersebut tidak melakukan sesuatu pekerjaan yang penting (major activity) yang memberi keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara. Kemudian Soekadijo (Marpaung, 2016: 12) meberikan pendapatnya mengenai pengertian pariwisata yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dimana kegiatan tersebut berhubungan dengan wisatawan. Wisatawan dimaknai sebagai orang yang melakukan perjalanan ke tempat lain dengan tujuan tidak untuk menetap. Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, definisi wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Dari beberapa definisi tentang pariwisata yang disampaikan oleh para ahli di atas, penulis mencoba menyimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan ataupun perjalan ke tempat lain di luar lingkungan tempat tinggal/ rumah, dengan tujuan untuk melakukan rekreasi, mengisi waktu luang, pertemuan, dan kegiatan

menyenangkan lain diluar melakukan pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan permanen maupun sementara, Pariwisata juga menyangkut berbagai aspek yang mendukung dan berhubungan dengan wisatawan seperti penginapan, akses jalan, transportasi dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan quasi kualitatif yang menekankan pada analisis dan penggambaran suatu kondisi realita, selain itu dalam penelitian kualitatif ini juga berupaya mencari konteks dari sebuah informasi semaksimal mungkin, agar informasi yang diperoleh menjadi lebih bermakna . Informan penelitian ditentukan secara *Snowball* dan dengan *Key Informan* Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga, dan Pariwisata. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh dari data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang didapat melalui orang atau suatu lembaga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis domain dan taksonomi. Analisis merupakan tindakan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat, pada tahap ini peneliti mengolah data yang sudah diinput pada tahap penelitian menggunakan tahapan analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2009, 15-19) yaitu melalui Pengumpulan data, Reduksi Data, Display Data dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Kualitas Data, untuk melihat kualitas data menurut Creswell & Miller (2012: 286) Validitas merupakan kekuatan lain dalam penelitian kualitatif selain reliabilitas. Validitas ini didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan atau pembaca secara umum. Validitas data dengan melakukan triangulasi data/sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen merupakan sebuah usaha menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Manajemen di sektor publik tentu akan berbeda dengan manajemen di sektor swasta, di sektor publik ruang gerak manajemen lebih dibatasi atau terikat dengan aturan-aturan formal. Untuk

mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata daerah tentu butuh pelaksanaan manajemen yang baik agar tujuan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Jamianton Damanik dan Frans Teguh (2013:25) mengatakan bahwa ada 4 (empat) langkah manajemen pariwisata yaitu perencanaan, pengorganisasian, implementasi program, serta pengawasan. Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada perencanaannya.

Perencanaan (*planning*)

Langkah awal dari proses manajemen pariwisata adalah menentukan rencana kegiatan manajemen yang akan dilakukan. Perencanaan sangat mempengaruhi langkah-langkah manajemen setelahnya, karena di dalam perencanaan tercantum apa yang harus dilakukan pada proses pengorganisasian, implementasi program, serta pengawasan, apabila proses perencanaan tidak berjalan maksimal tentu proses-proses setelahnya juga akan sama.

1. Penetapan tujuan pokok dan penunjang manajemen pariwisata

Dalam menjalankan sebuah organisasi, tujuan merupakan hal yang harus dicapai. Suatu organisasi harus memiliki tujuan karena untuk apa sebuah organisasi dibentuk apabila tidak memiliki tujuan yang akan dicapai. Dalam penelitian ini, aspek-aspek yang akan dianalisa di dalam penetapan tujuan adalah ada tidaknya visi, kejelasan visi, dan pemahaman pegawai Dinporapar Kabupaten Pekalongan terhadap visi yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, visi manajemen pariwisata di Kabupaten Pekalongan terangkum ke dalam visi organisasi Dinporapar Kabupaten Pekalongan. Visi tersebut tercantum di dalam dokumen Renstra Dinporapar Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 dan tertera pada laman *website* resmi Dinporapar Kabupaten Pekalongan. Visi Dinporapar Kabupaten Pekalongan adalah “*Mewujudkan Pemuda Dan Olahraga Unggul dan Berprestasi Optimal Serta Mewujudkan Pariwisata Andalan Demi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pekalongan*” , dari bunyi visi tersebut tercantum visi di bidang pariwisata yaitu Mewujudkan Pariwisata Andalan Demi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Visi di bidang pariwisata sudah jelas, namun pegawai Dinporapar Kabupaten Pekalongan terkesan belum memahami visi tersebut tercermin di

dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dimana semua narasumber yang berasal atau berlatarbelakang sebagai ASN Dinporapar Kabupaten Pekalongan tidak ada yang hafal bunyi dari visi organisasi Dinporapar Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentu akan berpengaruh di dalam pelaksanaan tugas manajemen pariwisata, karena bisa jadi ada ketidaksesuaian antara visi dengan program untuk mencapai visi tersebut dikarenakan pegawai yang tidak memahami tujuan/visi organisasi.

2. Perumusan desain program organisasi manajemen pariwisata

Setelah menetapkan tujuan, langkah selanjutnya adalah merumuskan program-program untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 3 (tiga) hal yang diperhatikan dalam menganalisis program manajemen pariwisata di Kabupaten Pekalongan yaitu, apa saja program manajemen pariwisata Kabupaten Pekalongan; Proses perumusan program; dan siapa saja pihak yang terlibat dalam perumusan program.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam melaksanakan kegiatan manajemen pariwisata, Dinporapar Kabupaten Pekalongan telah menetapkan 3 (tiga) program utama yaitu program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan destinasi pariwisata, dan program pengembangan kemitraan. Setiap program diikuti oleh berbagai kegiatan yang sifatnya lebih spesifik. Program dan kegiatan manajemen pariwisata di Kabupaten Pekalongan tercantum di dalam Renstra Dinporapar Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021.

Perumusan program manajemen pariwisata dilakukan oleh tim di Bappeda Kabupaten Pekalongan. Peran dari Dinporapar adalah mengusulkan program apa saja yang akan diajukan ke Bappeda. Proses perumusan program dimulai dari Bidang Pariwisata Dinporapar Kabupaten Pekalongan yang melakukan penghimpunan usulan program atau kegiatan dari UPTD Pengelola Objek Wisata, kemudian Bidang Pariwisata melakukan rapat untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dikonsultasikan kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, program dan kegiatan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas akan diajukan kepada Bappeda Kabupaten Pekalongan. Program dan kegiatan yang telah disetujui oleh Bappeda kemudian akan disahkan oleh DPRD, untuk kemudian dilaksanakan/diimplementasikan pada tahun berikutnya oleh

Dinporapar Kabupaten Pekalongan sebagai pelaksana program dan kegiatan. Disetujui atau tidaknya program yang diusulkan kepada Bappeda sangat bergantung pada kesesuaian dengan visi-misi Bupati dan ketersediaan atau kemampuan anggaran daerah.

Program prioritas di tahun 2019 adalah pengembangan destinasi pariwisata di Objek Wisata Linggo Asri, spesifiknya adalah pembangunan sarana dan prasarana.

3. Penentuan faktor penghambat dan penunjang manajemen pariwisata

Dalam proses manajemen pariwisata pasti ada hal-hal yang dapat menghambat maupun mendorong terlaksananya kegiatan tersebut. Dinporapar Kabupaten Pekalongan harus menentukan hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi berdasarkan pengalaman periode tahun sebelumnya ataupun perkiraan hambatan kedepan, untuk bagaimana caranya mengatasi hambatan tersebut supaya tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi. Begitupun Dinporapar harus menentukan faktor-faktor apa saja yang bisa mendorong terlaksananya manajemen pariwisata di Kabupaten Pekalongan dengan harapan bisa memanfaatkan faktor pendorong tersebut untuk mendukung suksesnya kegiatan manajemen yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh Dinporapar Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan manajemen pariwisata, antara lain 1) anggaran pariwisata yang terbatas, keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama usulan-usulan program dan kegiatan pengembangan objek wisata sering tidak disetujui oleh Pemda, selain itu keterbatasan anggaran juga mengakibatkan program peremajaan fasilitas objek wisata dan pengembangan objek wisata berjalan tidak maksimal, usaha untuk menambah daya tarik objek wisata agar bisa mengikuti tren yang sedang berkembang terhalang oleh tidak adanya anggaran; 2) mindset SDM pengelola yang cenderung minim inovasi dan minim keinginan untuk berkembang mengakibatkan pengembangan objek wisata menjadi *stagnan*, SDM pengelola yang berlatarbelakang seorang ASN hanya berfikir untuk mencapai target yang dibebankan oleh Pemda, berbeda dengan swasta yang selalu berfikir untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-sebesarnya sehingga memacu untuk

bekerja secara maksimal dan memunculkan inovasi-inovasi untuk mencapai apa yang mereka inginkan; 3) proses manajemen pariwisata seringkali terhambat oleh aturan-aturan formal birokrasi yang mengikat yang mengakibatkan kreatifitas pengelola menjadi terbatas. Aturan-aturan tersebut diantaranya aturan yang mengharuskan pendapatan dari objek wisata langsung disetor ke kas daerah, tidak diperbolehkan untuk langsung digunakan meskipun untuk kebutuhan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata layaknya yang dilakukan oleh swasta. Aturan besaran tarif tiket masuk objek wisata melarang pengelola menambah besaran harga tiket, kondisi ini menghambat pengelola ketika ingin menambah atraksi hiburan (konser musik, dsb) di dalam objek wisata sedangkan pengelola membutuhkan dana tambahan untuk menghadirkan hiburan tersebut. Prosedur dan alur birokrasi yang panjang untuk pengajuan penambahan daya tarik wisata mengakibatkan objek wisata tidak mampu mengikuti tren atraksi wisata yang sedang berkembang; 4) tidak sterilnya area objek wisata dari aktivitas masyarakat setempat dan lahan di area objek wisata yang tidak sepenuhnya merupakan kepemilikan Pemda, membuat ruang gerak pengelola menjadi terbatas dan rawan terjadi konflik kepentingan dengan pihak tertentu, masalah ini terjadi di OW Linggo Asri dan OW Pantai Depok; 5) kurangnya peran dan kesadaran dari masyarakat sekitar untuk ikut menjaga dan mengembangkan objek wisata, tercermin dari banyaknya warga yang membuka lahan parkir dan warung liar di area objek wisata tanpa koordinasi dengan pihak pengelola objek wisata; 6) rob yang terjadi di OW Pantai Depok seringkali membuat fasilitas wisata menjadi cepat rusak terutama yang terbuat dari bahan logam/besi; 7) banyak warga sekitar yang membuka parkir liar di area objek wisata dan menarik uang parkir kepada wisatawan, padahal sebetulnya tarif tiket sudah terakomodir ke dalam tiket masuk objek wisata, kondisi ini tentu akan merugikan wisatawan dan mengakibatkan area objek wisata terkesan kurang tertata; 8) kurangnya fasilitas objek wisata dan kondisi fasilitas yang usang menghambat pengembangan objek wisata, fasilitas yang kurang antara lain penginapan atau hotel dengan fasilitas yang baik dan kapasitas yang dapat menampung banyak wisatawan, kemudian fasilitas tempat parkir dan petugas parkir, serta fasilitas lain seperti toilet dan mushola yang memadai; 9) jumlah SDM pengelola yang kurang memadai sehingga tidak

memungkinkan adanya spesialisasi kerja, setiap pegawai dituntut untuk bisa melakukan semua pekerjaan di objek wisata. minimnya jumlah SDM pengelola tentu akan meningkatkan beban kerja dan memperlambat penyelesaian tugas; 10) daya tarik investasi Kabupaten Pekalongan yang masih rendah khususnya di sektor pariwisata, membuat investor kurang tertarik untuk menanamkan modalnya sehingga perkembangan pariwisata Kabupaten Pekalongan lambat karena tidak adanya suntikan dana tambahan selain dari APBD yang juga jumlahnya sangat terbatas; 11) Keterbatasan lahan untuk pengembangan objek wisata.

Selain faktor penghambat, Dinporapar Kabupaten Pekalongan juga memiliki faktor pendorong yang apabila dimanfaatkan dengan baik dapat mensukseskan kegiatan manajemen pariwisata. Faktor-faktor pendorong tersebut antara lain, Kabupaten Pekalongan memiliki sumber daya alam yang lengkap dan sangat potensial untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata, mulai dari pantai atau pesisir sampai ke dataran tinggi atau pegunungan. Kondisi ini memungkinkan Kabupaten Pekalongan memiliki daya tarik wisata yang beragam yang dapat menarik kunjungan wisatawan apabila bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Faktor pendorong yang lain adalah ketersediaan lahan yang masih luas dan masih banyak potensi sumber daya alam yang belum tergarap memungkinkan untuk memunculkan destinasi wisata baru yang menarik. Faktor penunjang selanjutnya adalah perkembangan usaha pariwisata lokal Kabupaten Pekalongan, dukungan pengembangan dan anggaran dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan Terbukanya kemungkinan kerjasama dengan pihak ketiga, namun faktor-faktor pendorong tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

4. Menyusun langkah strategis pelaksanaan manajemen pariwisata

Strategi pada dasarnya adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Begitupun juga di dalam upaya manajemen pariwisata di Kabupaten Pekalongan memerlukan strategi-strategi agar pencapaian visi semakin cepat diraih.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinporapar Kabupaten Pekalongan untuk menunjang suksesnya program-program yang direncanakan, strategi-strategi tersebut tercantum di dalam dokumen Renstra

Dinporapar Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021. Yaitu : Optimalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan destinasi pariwisata, Peningkatan sara dan prasarana penunjang destinasi pariwisata dan Peningkatan pengembangan kemitraan pariwisata melalui Pokdarwis. Secara lebih spesifik ditahun 2019, strategi yang akan dilakukan adalah menambah spot-spot daya tarik baru di destinasi pariwisata yang merupakan kepemilikan dan dikelola langsung oleh Pemda.

5. Melakukan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha-usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Pekalongan

Pendataan terhadap usaha-usaha pariwisata mulai dari objek wisata apa saja yang ada, sampai dengan usaha-usaha yang ada disekitarnya seperti pedagang makanan, restoran, hotel, dan lain-lain diperlukan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan kedepannya, dengan adanya data yang jelas tentu dapat mempermudah koordinasi antar komunitas di dalam destinasi wisata tersebut. Hal-hal yang dianalisis antara lain apakah Dinporapar Kabupaten Pekalongan telah melakukan pendataan usaha-usaha pariwisata dan apa saja usaha pariwisata yang sudah terdata. Berdasarkan hasil penelitian, Dinporapar Kabupaten Pekalongan telah melakukan pendaftaran, pencatatan dan pendataan usaha-usaha pariwisata yang ada di Kabupaten pekalongan. Namun, pendataan yang dilakukan hanya sebatas data objek-objek wisata yang ada, untuk pedagang maupun usaha-usaha disekitar objek wisata belum dilakukan pendataan. Dinporapar Kabupaten Pekalongan kesulitan untuk melakukan pendataan terhadap pedagang-pedagang yang ada disekitar objek wisata dikarenakan pedagang-pedagang tersebut belum tertata dan masih bersifat liar baik secara lokasi berdagang yang belum terintegasi dan belum adanya paguyuban yang menaungi pedagang-pedagang tersebut sehingga koordinasi dengan pihak pengelola destinasi wisata sulit untuk dilakukan. Pedagang-pedagang membuka warung/lapak di area objek wisata tanpa meminta izin kepada pihak pengelola objek wisata.

6. Mengalokasikan anggaran pariwisata

Dalam penyelenggaraan manajemen pariwisata di Kabupaten Pekalongan harus ada anggaran (dana) yang dialokasikan dalam hal ini adalah oleh pemerintah

kabupaten kepada tim pengelola objek wisata untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan, kemudian juga harus menentukan target pendapatan yang diterima, supaya diketahui apakah dengan anggaran yang telah dikeluarkan dapat meningkatkan perkembangan pariwisata daerah sekaligus menambah PAD atau justru sebaliknya. Berdasarkan teori manajemen pariwisata, dalam menganalisa alokasi anggaran pariwisata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu berapa anggaran pariwisata yang dialokasikan, apakah jumlah tersebut cukup untuk pengembangan pariwisata daerah, apakah ada sumber dana lain selain APBD yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata, berapakah target pendapatan dari sektor pariwisata, serta apakah target-target tersebut selalu tercapai sehingga dapat berkontribusi terhadap PAD.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah merumuskan dan menganggarkan dana untuk melaksanakan program-program pariwisata yang telah dirumuskan pula. Besar kecil anggaran sangat berpengaruh kepada pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian visi sektor pariwisata. Jumlah anggaran yang dikeluarkan tiap tahunnya berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD Kabupaten Pekalongan. Tahun 2019, anggaran daerah yang diterima oleh Dinporapar untuk melaksanakan program-program pariwisata sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pekalongan. Fokus penggunaan anggaran di tahun 2019 adalah untuk pengembangan Objek Wisata Linggo Asri.

Anggaran pariwisata yang dikururkan secara keseluruhan belum mencukupi untuk melakukan manajemen pariwisata secara maksimal. Pada realitanya anggaran yang tersedia hanya efektif untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas di objek wisata yang sudah ada. Anggaran yang tersedia belum cukup untuk melakukan pengembangan objek wisata, untuk melakukan pengembangan objek wisata seperti penambahan daya tarik baru dan fasilitas objek wisata, Dinporapar Kabupaten Pekalongan memanfaatkan sumber dana lain dari luar pemerintah kabupaten/APBD. Beberapa sumber dana lain yang dapat dimanfaatkan oleh Dinporapar Kabupaten Pekalongan untuk melakukan pengembangan objek wisata selain dana dari APBD Kabupaten Pekalongan adalah dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Untuk mendapatkan

Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

bantuan dari pemerintah pusat, Dinporapar Kabupaten Pekalongan harus mengajukan usulan kegiatan atau pembangunan terlebih dahulu. DAK yang diterima Dinporapar pada tahun 2019 adalah sebesar lebih dari Satu Milyar Rupiah. Selain dari pemerintah pusat, Dinporapar terkadang juga mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sumber dana lain yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata adalah dana aspirasi DPRD Kabupaten Pekalongan, namun dana ini hanya dapat diajukan untuk objek wisata yang dikelola oleh swasta masyarakat, artinya Dinporapar tidak bisa menggunakan dana aspirasi DPRD untuk kebutuhan objek wisata yang dikelola oleh Pemda. Setelah mengeluarkan anggaran untuk pelaksanaan program manajemen pariwisata, Pemerintah Kabupaten Pekalongan tentu berharap ada timbal balik pendapatan dari sektor pariwisata yang dapat berkontribusi signifikan menambah PAD. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah membebankan target pendapatan sektor pariwisata kepada Dinporapar Kabupaten Pekalongan. Target yang dibebankan setiap tahun selalu berbeda dan selalu meningkat. Target pendapatan sektor pariwisata tahun 2019 sebesar Rp 1.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan tahun 2020 naik menjadi Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Target pendapatan tahun 2015-2017 selalu terlampaui meskipun tidak signifikan, sedangkan di tahun 2018 target pendapatan tidak dapat tercapai dan mengalami defisit yang cukup besar yaitu Rp 32.134.500,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah). Target pendapatan di tahun 2019 diprediksi dapat terlampaui karena adanya penambahan daya tarik baru di OW Lingo Asri yaitu taman bunga celosia (konsep mini world) yang bisa menarik kunjungan wisatawan, terbukti dari tren kunjungan wisatawan perbulan yang selalu naik di tahun 2019 yang sedang berjalan. Berikut ini adalah data target pendapatan sektor pariwisata beserta pencapaiannya:

Tabel 2.
Target dan Pencapaian Pendapatan Sektor Pariwisata tahun 2015 sd 2018

| No | OBJEK PENDAPATAN | Target | Pendapatan | Lebih/Kurang |
|----|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | Pendapatan Asli daerah 2015 | 535.800.000 | 536.574.000 | 774.000 |

| | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | Pendapatan Asli daerah 2016 | 594.000.000 | 600.358.500 | 6.358.500 |
| 3 | Pendapatan Asli daerah 2017 | 608.500.000 | 611.293.500 | 2.793.500 |
| 4 | Pendapatan Asli daerah 2018 | 700.000.000 | 667.865.500 | -32.134.500 |

Sumber: Dinporapar Kab. Pekalongan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target pendapatan sektor pariwisata setiap tahun selalu bertambah dan pendapatan sektor pariwisata setiap tahunnya pun selalu bertambah. Namun, pada tahun 2018 pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata belum mampu untuk melampaui target yang dibebankan.

7. Menyusun Skema Pengendalian Kegiatan

Pengawasan dalam kegiatan manajemen pariwisata sangat penting kedudukannya untuk memastikan program-program berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kegiatan pengawasan juga perlu direncanakan secara matang agar pengawasan bisa dilakukan secara teratur dan terstruktur. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan oleh Dinporapar terhadap objek wisata belum terencana dan terskema dengan baik, belum ada jadwal rutin dan pasti untuk melakukan monitoring objek wisata. Pengawasan yang dilakukan kepada internal pegawai objek wisata belum dilakukan secara maksimal, pegawai objek wisata belum memiliki SOP kerja yang jelas yang dapat dijadikan patokan pengawasan oleh Dinporapar Kabupaten Pekalongan. Ketika pegawai objek wisata sedang melaksanakan pekerjaannya tidak ada pengawasan yang ketat sehingga kualitas penyelesaian kerja pegawai pun tidak bisa terjamin. Pengawasan objek wisata yang dilakukan oleh Dinporapar adalah dengan mengunjungi langsung objek wisata. Monitoring objek wisata dilakukan terus menerus tetapi tidak ada jadwal rutin dan pasti. Evaluasi sebagai upaya pengendalian kerja pegawai juga dilakukan apabila target pendapatan objek wisata perbulan tidak tercapai. Aspek yang menjadi fokus pengawasan objek wisata yang dilakukan oleh Dinporapar Kabupaten Pekalongan adalah pada pencapaian target pendapatan objek wisata. Belum ada pengawasan yang menyeluruh yang menyentuh kepada

aspek-aspek yang lebih spesifik dan rinci seperti kedisiplinan pegawai objek wisata dan kualitas penyelesaian pekerjaan pegawai objek wisata.

8. Arah pengembangan pariwisata Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan pariwisata Kabupaten Pekalongan harusnya menuju ke daerah bagian Selatan atau dataran tinggi yaitu di wilayah Kecamatan Petungkriyono. Kedua daerah ini merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki pemandangan sangat indah, banyak juga terdapat air terjun, kemudian ada danau yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata, udaranya pun sejuk hampir sama seperti Dieng. Kecamatan Petungkriyono memiliki hutan lindung dengan berbagai satwa dilindungi dan endemik seperti lutung, burung rangkong, dan lain-lain yang dapat dijadikan daya tarik wisata edukasi maupun penelitian. Banyak terdapat perkebunan sayur dan buah warga yang bisa dijadikan daya tarik wisata petik buah atau berkebun. Tradisi di Petungkriyono juga masih terjaga dimana yang paling terkenal adalah sedekah bumi yang rutin dilakukan masyarakat. Petungkriyono merupakan daerah penghasil kopi khas Kabupaten Pekalongan yang tentu bisa dijadikan daya tarik wisata berbasis kopi. Petungkriyono merupakan kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan Batur yang merupakan searah dengan jalan menuju Dieng, kondisi ini tentu menguntungkan sebagai suatu rangkaian wisata dengan Dieng, pengunjung bisa sekaligus berwisata ke Petungkriyono sebelum ke Dieng. Pengembangan wisata Petungkriyono yaitu pembuatan resort yang menyediakan fasilitas yang baik dengan pemandangan indah disekelilingnya, kemudian wisata berbasis event terutama budaya dan wisata berbasis kopi serta wisata berkebun. Tantangannya adalah perbaikan akses jalan yang masih kurang baik, biaya pengembangan yang besar sehingga butuh investor yang banyak, pendekatan sosial kepada masyarakat agar bisa menerima dan mendukung rencana pengembangan wisata ini, serta tantangan kelangsungan alam agar tidak ada kerusakan yang terjadi yang dapat menimbulkan bencana dan kerugian.

KESIMPULAN

Manajemen pariwisata di Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) masih belum baik, masih ditemukan kendala maupun permasalahan pada setiap tahapannya. Pada tahapan

Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

perencanaan terdapat permasalahan dimana pegawai tidak memahami visi Dinporapar, pendataan usaha pariwisata minim, anggaran terbatas, dan belum adanya mekanisme pengendalian (monitoring) kegiatan yang jelas.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengatasi keterbatasan anggaran pariwisata, fasilitas, dan atraksi wisata, koordinasi dan komunikasi dengan DPMPTSP untuk bekerjasama mencari dan menarik investor, Merekrut pegawai pengelola objek wisata diluar ASN dengan seleksi ketat dan terukur, Menambah atraksi wisata yang unik dan menarik sesuai dengan tren wisata yang sekarang atau yang akan berkembang, Memperbanyak pertunjukkan musik dan festival-festival. Menambah fasilitas tempat parkir, tempat berteduh, papan penunjuk arah, tempat sampah dan *food court* di OW Lingo Asri. Menambah fasilitas tempat berteduh dan tempat parkir di OW Bumi Perkemahan. Menambah fasilitas toilet, tempat bilas, rambu-rambu pembatas, petugas keselamatan, mushola dan tempat parkir di OW Pantai Depok. Mengembangkan potensi jenis-jenis pariwisata seperti *Scientific Tourism*, pariwisata agama, dan pariwisata kebudayaan, atau yang sedang *booming* adalah pariwisata berbasis kopi, Dinporapar harus bisa mengikuti tren pariwisata yang sedang berkembang agar tidak ketinggalan dengan daerah lain, karena tren wisata berkembang sangat dinamis. Membuat TIC berkonsep digital sebagai sarana informasi wisata dan promosi wisata daerah, Memperbanyak pengadaan Diklat, sertifikasi untuk pegawai dan pendidikan sadar wisata bagi masyarakat dan Pokdarwis, Merekrut admin media sosial (diluar ASN), untuk mengencarkan promosi wisata melalui media sosial dan internet, Mengencarkan promosi wisata dengan cara-cara yang lebih unik dan inovatif seperti bekerjasama dengan daerah lain yang pariwisatanya sudah maju, atau memanfaatkan putra daerah yang sedang menimba ilmu (mahasiswa) di daerah lain untuk ikut mempromosikan wisata Kabupaten Pekalongan, Pengelola harus tegas untuk menghapus parkir liar yang ada di area objek wisata, Melakukan pendataan dan penataan terhadap pedagang yang ada di area objek wisata, dengan menempatkan mereka ke spot-spot khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Damanik, Phil. Janianton. (2013). *Pariwisata Indonesia (Antara Peluang dan tantangan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Handoko, T Hani. (2011). *Manajemen (2nd ed.)*. Yogyakarta: BPFE

Hariani, Dyah. (2013). *Azas-Azas manajemen*. Semarang: UPT UNDIP Press Semarang.

Hasibuan, S.P. Malayu. (2006). *Manajemen (Dasar, Pengertian dan Masalah)*. Jakarta : Bumi Aksara

Keban, Yeremia T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)*. Yogyakarta: Gava Media.

Marpaung, happy. (2016). *Pengetahuan Kepariwisataaan*. Bandung: Arfino Raya

Pendit, S Nyoman. (1986). *Imu Pariwisata (Sebuah Pengantar Perdana)*. Pradnya Paramita: Jakarta.

Pitana, I Gede and Diarta, I Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit ANDi.

Ridhotullah dan Jauhar. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Prestasi Pustakaraya

Sugandi, Yogi Suprayogi. (2011). *Administrasi Publik (Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sukidin, Damai Darmadi. (2009). *Administrasi Publik*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo

Syafie, Inu kencana. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Mandar Maju

Sumber Jurnal

Abdillah, Dariusman. *Pengembangan Daya Tarik Wisata Planetarium Jagat Raya Tenggarong*. www.kemenpar.go.id.

Alam, Kodrat. (2015). *Pengelolaan Potensi Pariwisata Alam Kabupaten Pekalongan 2012-2015*.

Kristian, Yudy. (2017). *Pengelolaan Objek Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat di Danau Aco Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung*. *E-journal Administrasi Negara*, 5 (1) : 5404-5417

- Sudiarta and Suardana. (2016). Tourism Destination Planning Strategy (Analisis and Implementation of Marketing City Tour in Bali). *Procedia* . 227 : 664-670
- Suryani, Noak dan Yudhartha. (-). Analisis Pengelolaan Objek Wisata Dalam Mewujudkan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Badan Usaha Milik Desa Adat (BUMDA) (Studi Kasus Objek Wisata Kuta Selatan Kabupaten Badung).- . –
- Tisdell, Clem. (1989). Tourism and the Economic Development of the Maldives. *Annals of Tourism Research*, 16 : 254-269.

Sumber Lain

- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2007 – 2025
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2027
Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2018
Dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021
Dokumen Renstra Dinporapar Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021
Dokumen LkjIP Dinporapar Kabupaten Pekalongan tahun 2018
Dokumen Rencana Aksi Dinporapar Kabupaten pekalongan Tahun 2019
Website Resmi Dinporapar Kabupaten pekalongan
Akun Instagram @wisata_pekalongankab
3 Program Utama Kemenpar Untuk Capai Target Kunjungan Turis di 2019.(2017). Dalam <https://travel.detik.com>. Diunduh pada 15 November pukul 13.00 WIB.
Longsor jalur Doro-Petungkriyono Nyaris Putus. (2017). www.pekalongan-news.com. Diunduh pada 13 Desember pukul 13.42 WIB.
Pekalongan darurat banjir Rob .(2016). Dalam <https://elshinta.com>. Diunduh pada 25 November pukul 14.00 WIB.